

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH (BOS) DI SMA
NEGERI I BLAHBATUH GIANYAR
TAHUN 2018**

Oleh :

Desak Putu Sukarini

ARTICLE INFO

Article history

Received

Accepted

Key word: *Management Lents Fund
BOSS*

Kata Kunci : *Pengelolaan Dana BOS*

ABSTRACT

Commanding effort in this case Education and culture ministry to settle that thing is give Schooled Operational Relief Fund that gave by Education and culture ministry called by National BOSS or succeeding one in observational it was called BY BOSS, besides National BOSS exists also BOSDA (Region boss) one that gave by Local Government / Province. Construction directorate policy SMA, BOSS fund can be utilized for buy need / tutorial textbook duplication, schooled stationery buy that is utilized for learning, is problem and is student answer sheet in activity replicates and test, hand tool buy for stationary education . Base problem background already been described above, therefore acquired problem formula which is how Schooled Operational relief fund management (BOSS) base swakelola's principle and participative at SMA Country 1 Blahbatuh Gianyar? . Base problem formula upon, therefore observational arranged aim it is analysis Schooled Operational relief fund management (BOSS) on SMA Country 1 Blahbatuh Gianyar. Total sample determined by census method as much 28 person. dianalisis's data with mean, modus and frequency distribution table each variable. Result points out SMA is Country 1 Blahbatuh Gianyar has done reporting well overall reporting and also brief reporting and is turned over to on duty Bali's Province Education. Schooled Operational relief fund management (BOSS) at SMA Country 1 Blahbatuh Gianyar bases administration order principle and reporting be performed with every consideration since has good trend point which is $x > 18$ as big as 100%. Schooled Operational relief fund management (BOSS) at SMA Country 1 Blahbatuh Gianyar bases principle each other believe with every consideration been performed since has good trend point which is $x > 6$ a number 89%.

ABSTRAK

Upaya pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengatasi hal tersebut adalah memberikan Dana Bantuan Operasional Sekolah yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disebut dengan BOS Nasional atau yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut BOS, selain BOS Nasional terdapat juga BOSDA (BOS Daerah) yang diberikan oleh Pemerintah Daerah/Provinsi. Kebijakan Direktorat Pembinaan SMA, dana BOS dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelian/peggandaan buku teks pelajaran, pembelian alat tulis sekolah yang digunakan untuk pembelajaran, peggandaan soal dan penyediaan lembar jawaban siswa dalam kegiatan ulangan dan ujian, pembelian peralatan tangan untuk keperluan pendidikan. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka diperoleh rumusan masalah yaitu bagaimanakah pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berdasarkan prinsip swakelola dan partisipatif di SMA Negeri 1 Blahbatuh Gianyar?. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan diadakan penelitian ini adalah menganalisis pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMA Negeri 1 Blahbatuh Gianyar. Jumlah sampel ditentukan dengan metode sensus sebanyak 28 orang. Data dianalisis dengan mean, modus dan tabel distribusi frekuensi masing-masing variabel. Hasil menunjukkan SMA Negeri 1 Blahbatuh Gianyar telah melakukan pelaporan baik laporan keseluruhan maupun laporan ringkas dan diserahkan ke Dinas Pendidikan Propinsi Bali. Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 1 Blahbatuh Gianyar berdasarkan prinsip tertib administrasi dan pelaporan dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik yaitu $x > 18$ sebesar 100%. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 1 Blahbatuh Gianyar berdasarkan prinsip saling percaya dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik yaitu $x > 6$ sejumlah 89%.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, pasal 3, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Adapun fungsi nasional pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Menurut Siswoyo, dkk (2013: 52) Salah satu pendidikan suatu bangsa adalah peran negara dalam menyediakan sarana pendidikan. lingkungan dan sarana pendidikan merupakan sumber yang dapat menentukan kualitas serta berlangsungnya usaha pendidikan. Lingkungan tersebut dapat bersifat lingkungan fisik, sosial dan budaya yang semuanya memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap usaha pendidikan. Belum memadainya tempat pendidikan (gedung sekolah, sarana olahraga dan rekreasi), perlengkapan, alat pendidikan, materi pendidikan, kurangnya kerjasama antara berbagai lembaga dalam masyarakat, rendahnya pendidikan penduduk serta biaya pendidikan yang relatif mahal pada umumnya dapat menghambat berlangsungnya pendidikan dengan baik. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Salah satu peran negara dalam hal tersebut adalah dengan memberikan atau meringankan biaya pendidikan di Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjelaskan bahwa secara garis besar biaya pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.

Upaya pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengatasi hal tersebut adalah memberikan Dana Bantuan Operasional Sekolah yang diberikan oleh Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan disebut dengan BOS Nasional atau yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut BOS, selain BOS Nasional terdapat juga BOSDA (BOS Daerah) yang diberikan oleh Pemerintah Daerah/Provinsi.

Menurut Fitria (2014) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya digunakan untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan wajib belajar 9 tahun. Wajib belajar 9 tahun bertujuan untuk memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia agar dapat mengembangkan potensi dirinya sehingga dapat hidup mandiri dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun yang bermutu, Pemerintah mengalokasikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Keberhasilan pelaksanaan BOS dapat dilihat dari percepatan penuntasan wajib belajar.

Erwantosi (2010) menyatakan kebijakan Direktorat Pembinaan SMA, dana BOS dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelian/penggandaan buku teks pelajaran, pembelian alat tulis sekolah yang digunakan untuk pembelajaran, penggunaan soal dan penyediaan lembar jawaban siswa dalam kegiatan ulangan dan ujian, pembelian peralatan tangan untuk keperluan pendidikan, pembelian bahan praktik atau bahan habis pakai, penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa ekstrakurikuler, penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi penyelenggaraan praktik kerja industri, pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana prasarana sekolah, langganan daya dan jasa lain, kegiatan penerimaan siswa baru pengembangan sekolah rujukan, peningkatan mutu proses pembelajaran, operasional layanan sekolah berbasis TIK dan pelaporan.

Menurut Hastyarini (2015) Pengelolaan dana BOS di sekolah belum sesuai dengan ketentuan yang ada. Hasil Pemeriksaan BPK Semester I tahun 2015 menyatakan terdapat beberapa masalah terkait pengelolaan dana BOS. Permasalahan umum mengenai pengelolaan dana BOS yang menjadi temuan BPK meliputi sisa dana BOS yang belum dikembalikan ke kas negara,

penyebab kekurangan penerimaan negara atas sisa dana, penggunaan dana BOS yang tidak sesuai ketentuan, kelebihan penggunaan dana BOS, ketidakakuratan dalam pendataan penerima dana BOS yang menyebabkan kelebihan penyaluran dana BOS, penyusunan petunjuk teknis penyaluran dana BOS belum tepat sesuai dengan ketentuan dan sejumlah sekolah belum mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pengelolaan BOS ditinjau dari 7 prinsip pengelolaan BOS, maka diperlukan suatu analisis. Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis digunakan untuk menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga dapat memberikan landasan dari pembuat kebijakan dalam membuat suatu keputusan. Analisis juga digunakan untuk menentukan tolak ukur tingkat keberhasilan pelaksanaan dan penentuan suatu kebijakan.

Penyaluran BOS dilakukan setiap triwulan, yaitu Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember. Penggunaan BOS Hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada intervensi atau potongan dari pihak manapun. Analisis pengelolaan merupakan analisis untuk menentukan tolak ukur dan tingkat keberhasilan pengelolaan suatu program.

Melihat arti pentingnya analisis pengelolaan program BOS dalam penyelenggaraan pendidikan, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 1 Blahbatuh Gianyar Tahun 2018”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka diperoleh rumusan masalah yaitu apakah pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berdasarkan petunjuk teknis tahun 2018 di SMA Negeri 1 Blahbatuh Gianyar?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

berdasarkan petunjuk teknis 2018 pada SMA Negeri 1 Blahbatuh Gianyar.

METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah merupakan kerangka konsep yang digunakan untuk melaksanakan penelitian. Desain penelitian merupakan prosedur untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyusun atau menyelesaikan masalah dalam penelitian. Desain penelitian merupakan dasar dalam melakukan penelitian. Oleh sebab itu desain penelitian yang baik akan menghasilkan penelitian yang efektif dan efisien. Desain penelitian ini dibagi dua tipe yaitu eksploratif dan konklusif. Dalam penelitian konklusif dibagi dua tipe yaitu deskriptif dan kausal. Dalam penelitian ini digunakan penelitian eksploratif dan deskriptif. Supranto J (2008:167), penelitian eksploratif bertujuan untuk menyelidiki suatu masalah atau situasi untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang baik. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sesuatu. Penelitian deskriptif memiliki pernyataan yang jelas mengenai permasalahan yang dihadapi, hipotesis yang spesifik dan informasi detail yang dibutuhkan.

2. Lokasi dan Obyek Penelitian.

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Blahbatuh Gianyar yang beralamat di Jalan Astina Jaya Blahbatuh Gianyar. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Januari 2019 sampai Maret 2019. Penelitian ini dilakukan selama waktu 3 bulan tersebut, peneliti melakukan persiapan, perencanaan dan pelaksanaan. Tahap pelaporan dilaksanakan pada bulan April 2019.

b. Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah adalah pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Atas (SMA) ditinjau dari 7 prinsip pengelolaan dana BOS berdasarkan Petunjuk Teknis BOS SMA 2018 yang meliputi prinsip swakelola dan partisipatif, transparan, akuntabel, demokratis, efektif dan efisien, tertib administrasi dan pelaporan, serta saling percaya.

3. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis inferensial. Ada dua langkah analisis yang dilakukan yaitu teknik analisis data responden yang meliputi *mean*, *median*, *modus* dan standar frekuensi serta analisis varians atau dispersi untuk mengetahui simpangan baku. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

a. Analisis data responden

Analisis ini diunakan untuk mendiskripsikan data dalam penelitian yang meliputi penyajian *mean*, *median*, *modus* dan tabel distribusi frekuensi masing-masing variabel. Adapun uraiannya sebagai berikut:

1) *Mean, Median dan Modus*

Menurut Sugiyono (2013:49) *mean* merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Rata-rata atau *mean* ini didapat dengan menjumlahkan data seluruh individu dalam kelompok itu, kemudian dibagi dengan jumlah individu yang ada pada kelompok tersebut.

2) Analisis Variasi atau Dispersi

Menurut Supranto. J (2008:138-139), dispersi merupakan ukuran jauh atau dekatnya nilai pengamatan dari rata-rata hitungnya. Dispersi digunakan untuk memberikan informasi tentang sebaran nilai pada data serta untuk membandingkan sebaran data dari dua informasi distribusi nilai. Perhitungan dispersi ini dapat dilakukan dengan menghitung Standar Deviasi.

Standar deviasi (baku) merupakan salah satu ukuran dispersi yang diperoleh dari akar kuadrat positif varians. Varians adalah rata-rata hitung dari kuadrat simpangan setiap pengamatan terhadap rata-rata hitungnya.

HASIL PENELITIAN

Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 1 Blahbatuh Gianyar dilaksanakan oleh tim pengelola Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

1. Prinsip swakelola dan partisipatif

Prinsip swakelola adalah direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri. Swakelola dalam penelitian ini adalah swakelola dalam

pengadaan barang/jasa untuk kegiatan sekolah. SMA Negeri 1 Blahbatuh Gianyar telah melaksanakan swakelola dengan membentuk tim belanja barang sendiri untuk pengelolaan dana BOS. Tim belanja barang untuk dana BOS terdiri dari anggota penanggungjawab pengadaan ATK dan anggota penanggungjawab pengadaan bahan praktik. Prinsip partisipatif adalah melibatkan warga sekolah dan masyarakat dalam memberikan dukungan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program sesuai dengan peraturan yang berlaku. Warga sekolah dan masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam memberikan dukungan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bentuk partisipasi yang diberikan adalah dengan melibatkan wakil orang tua siswa atau komite sekolah tidak tetap dalam rapat dewan guru bersama orang tua siswa. Dalam rapat tersebut, pihak SMA Negeri 1 Blahbatuh Gianyar menjelaskan mengenai program sekolah dalam satu tahun ke depan dan orang tua siswa dipersilahkan untuk memberikan kritik dan saran terhadap program tersebut termasuk di dalamnya program yang dibiayai dengan dana BOS.

Pengukuran prinsip swakelola dan partisipatif dilakukan dengan dua indikator yaitu pengelolaan sendiri serta keterlibatan sekolah dan masyarakat dalam pengelolaan dana BOS. Prinsip swakelola dan partisipatif baik apabila nilai $x > 15$, cukup baik apabila $10 \leq X < 15$, dan tidak baik apabila nilai $x < 10$. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa prinsip swakelola dan partisipatif memiliki frekuensi baik sebesar 70%, frekuensi cukup baik sebesar 19% dan frekuensi tidak baik sebesar 11%. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa SMA Negeri 1 Blahbatuh Gianyar dalam pengelolaan dana BOS telah melaksanakan prinsip swakelola dan partisipatif dengan baik.

2. Prinsip Transparan

Menurut Petunjuk Teknis Pengelolaan BOS Tahun 2015, prinsip transparan menekankan bahwa pengelolaan dana harus dilakukan secara terbuka agar warga sekolah dan masyarakat dapat memberikan kritik, saran serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap

pelaksanaan program. Salah satu cara sekolah untuk melaksanakan prinsip transparansi menurut Petunjuk Teknis Pengelolaan BOS Tahun 2015 adalah dengan menyebarluaskan informasi penerimaan program BOS SMK kepada warga sekolah, seperti menempelkan informasi program dan keuangan di papan pengumuman sekolah atau menyampaikan informasi dalam forum rapat dewan guru dengan komite sekolah/orang tua siswa. SMA Negeri 1 Blahbatuh Gianyar tidak menempelkan informasi program dan keuangan di papan pengumuman. Penyebaran informasi dilakukan dengan menyampaikan informasi dalam forum rapat dewan guru dengan komite sekolah/orang tua siswa ketika awal tahun ajaran baru dalam rapat dewan guru dan orang tua siswa.

Selain memberikan informasi mengenai dana BOS kepada warga sekolah, transparansi juga mengandung arti bahwa warga sekolah dan masyarakat mudah mendapatkan informasi mengenai dana BOS. Belum ada orang tua siswa yang mengajukan pertanyaan terkait dengan penggunaan atau pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Blahbatuh Gianyar. Transparan juga mengandung arti bahwa masyarakat dapat memberikan kritik, saran serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap program. Orang tua siswa belum pernah mengajukan kritik ataupun saran terhadap pengelolaan BOS walaupun sekolah telah memfasilitasi baik secara langsung dalam rapat orang tua wali murid atau secara tidak langsung melalui kontak sekolah.

Pengukuran prinsip transparan dilakukan dengan menggunakan beberapa indikator yaitu keterbukaan menerima kritik dan saran serta keterbukaan dalam pengawasan dan pengendalian. Prinsip transparan baik apabila memiliki nilai $x > 9$, cukup baik apabila $6 \leq X < 9$, dan tidak baik apabila nilai $x < 6$. Hasil analisis deskriptif menunjukkan prinsip transparan memiliki frekuensi baik sebesar 19%, frekuensi cukup baik sebesar 78% dan frekuensi rendah sebesar 4%. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa SMA Negeri 1 Blahbatuh Gianyar dalam pengelolaan dana BOS telah melaksanakan prinsip transparansi dengan cukup baik.

3. Prinsip Akuntabel

Prinsip akuntabel adalah pengelolaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang sudah disepakati. Pengukuran prinsip akuntabel dilakukan dengan beberapa indikator yaitu : pertanggungjawaban terhadap pemerintah, masyarakat dan warga sekolah, pengembalian kelebihan dana, dan penggunaan dana. Prinsip akuntabel baik apabila nilai $x > 18$, cukup baik apabila $12 \leq X < 18$, dan tidak baik apabila nilai $x < 12$. Hasil analisis deskriptif menunjukkan prinsip akuntabel memiliki frekuensi relatif yang baik sebesar 96%, sedang sebesar 4% dan rendah sebesar 0%. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa SMA Negeri 1 Blahbatuh Gianyar dalam pengelolaan dana BOS telah melaksanakan pertanggungjawaban sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan prinsip akuntabel dengan baik.

4. Prinsip Demokratis

Prinsip demokratis adalah penyusunan perencanaan, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah ditempuh melalui jalan musyawarah/mufakat dengan memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk mengajukan saran, kritik atau pendapat. Berdasarkan hasil wawancara, prinsip demokratis dilaksanakan dengan memberikan kesempatan kepada orang tua siswa untuk memberikan saran, kritik atau pendapat, namun belum ada orang tua siswa yang memberikan saran, kritik dan pendapat terkait pelaksanaan program BOS. Prinsip demokratis diukur dengan beberapa indikator yaitu: kesempatan memberikan saran, kritik dan pendapat, serta musyawarah dalam penyelesaian masalah. Prinsip demokratis baik apabila memiliki nilai $x > 30$, cukup baik apabila $20 \leq X < 30$, dan tidak baik apabila $x < 20$.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif prinsip demokratis memiliki frekuensi baik sebesar 74%, frekuensi sedang sebesar 26% dan frekuensi rendah sebesar 0%. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa SMA Negeri 1 Blahbatuh Gianyar dalam pengelolaan dana BOS telah melaksanakan prinsip demokratis dengan baik.

5. Prinsip Efektif Dan Efisien

Prinsip efektif dan efisien yaitu pemanfaatan dana harus efektif dan efisien

sesuai dengan ketentuan yang ada. Pengukuran prinsip efektif dan efisien dilakukan dengan beberapa indikator yaitu: seleksi penerima BOS dan kesesuaian jumlah dana dengan jumlah siswa. Prinsip efektif dan efisien baik apabila memiliki nilai $x > 6$, cukup baik apabila $4 \leq X < 6$ dan tidak baik apabila $x < 4$.

Hasil analisis deskriptif menunjukkan prinsip efektif dan efisien memiliki frekuensi relatif yang baik sebesar 63%, frekuensi relatif yang cukup baik sebesar 22% dan frekuensi relatif yang tidak baik sebesar 15%. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa SMA Negeri 1 Blahbatuh Gianyar dalam pengelolaan dana BOS telah melaksanakan prinsip efektif dan efisien dengan baik.

6. Prinsip Tertib Administrasi Dan Pelaporan

Prinsip tertib administrasi dan pelaporan adalah sekolah penerima dana harus menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan. SMA Negeri 1 Blahbatuh Gianyar telah membuat Rencana

Anggaran dan Kegiatan Sekolah (RKAS) maupun rincian penggunaan BOS. Pengelola dana atau anggota pengelola keuangan BOS di SMA Negeri 1 Blahbatuh Gianyar telah melaksanakan pembukuan. Pembukuan dana BOS tahun 2018 baik secara administratif maupun pelaporan meliputi: buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku kas pembantu tunai, buku kas pembantu bank, bukti pengeluaran dana BOS, MOU BOS, laporan pelaksanaan program, laporan ringkas, laporan keseluruhan, dan laporan pertanggungjawaban. SMA Negeri 1 Blahbatuh Gianyar telah melaksanakan pelaporan sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengelolaan BOS SMA 2018. Pelaporan dana BOS tahun 2018 periode Januari – Juni telah selesai dan dilaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar, pelaporan dana BOS tahun 2018 periode Juli-Desember 2018 masih dalam tahap penyelesaian. Laporan sekolah dibagi menjadi dua yaitu laporan keseluruhan dan laporan ringkas. Laporan keseluruhan SMA Negeri 1 Blahbatuh Gianyar berisi narasi laporan, pertanggungjawaban penggunaan BOS SMA

Negeri 1 Blahbatuh Gianyar dan foto dokumentasi kegiatan sekolah dalam menggunakan dana BOS. Adapun laporan ringkas mencakup penggunaan dana dari sisi pembelanjaan yaitu untuk belanja operasional sekolah dan non personalia. Laporan ringkas sudah ditandatangani oleh ketua komite sekolah, kepala sekolah, bendahara rutin sekolah serta dilengkapi stempel sekolah dan stempel komite sekolah sehingga laporan tersebut dapat dinyatakan sah.

Pengukuran prinsip tertib administrasi dan pelaporan dilakukan dengan menggunakan beberapa indikator yaitu : administrasi dan laporan.

Prinsip tertib administrasi dan pelaporan baik apabila memiliki nilai $X > 18$, cukup baik apabila $12 \leq X < 18$, dan tidak baik apabila $X < 12$. Berdasarkan hasil analisis deskriptif menunjukkan prinsip tertib administrasi dan pelaporan memiliki frekuensi baik sebesar 100%, frekuensi cukup baik sebesar 0% dan frekuensi tidak baik sebesar 0%.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa SMA Negeri 1 Blahbatuh Gianyar dalam pengelolaan dana BOS telah melaksanakan prinsip tertib administrasi dan pelaporan dengan baik.

7. Prinsip Saling Percaya

Pemberian dana BOS berlandaskan rasa saling percaya antara pemberi dan penerima, termasuk warga sekolah dan masyarakat. Orang tua siswa percaya bahwa SMA Negeri 1 Blahbatuh Gianyar sebagai penerima dana BOS telah melaksanakan pengelolaan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun orang tua siswa tidak percaya kepada pemerintah selaku pemberi dana dalam melaksanakan tugasnya tanpa melakukan tindak kecurangan.

Pengukuran prinsip saling percaya dilakukan menggunakan beberapa indikator yaitu kepercayaan terhadap pemberi dana dan penyalur dana. Prinsip saling percaya baik apabila memiliki nilai $X > 6$, cukup baik apabila $4 \leq X < 6$, dan tidak baik apabila nilai $X < 4$. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa prinsip saling percaya memiliki frekuensi baik sebesar 89%, frekuensi cukup baik sebesar 11% dan frekuensi tidak baik sebesar 0%. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa SMA Negeri 1 Blahbatuh Gianyar dalam

pengelolaan dana BOS telah melaksanakan prinsip saling percaya dengan baik.

PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

a. Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 1 Blahbatuh Gianyar berdasarkan prinsip swakelola dan partisipatif dilaksanakan dengan baik, berdasarkan prinsip transparan dilaksanakan dengan cukup baik, berdasarkan prinsip akuntabel dilaksanakan dengan baik, berdasarkan prinsip efektif dan efisien dilaksanakan dengan baik, berdasarkan prinsip tertib administrasi dan pelaporan dilaksanakan dengan baik, dan berdasarkan prinsip saling percaya dilaksanakan dengan baik

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka dalam upaya meningkatkan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diajukan saran sebagai berikut:

- a. Sekolah bersama komite sekolah mensosialisasikan kepada orang tua bahwa semua siswa menerima BOS.
- b. Sekolah diharapkan dapat melaporkan mengenai laporan penggunaan dana BOS untuk apa saja agar orang tua mengetahui bagaimana pengelolaan dana BOS di sekolah. Diperlukan suatu pelatihan dalam bentuk bimbingan teknis bagi sumberdaya manusia khususnya pengelola BOS agar dapat bekerja secara efektif dan efisien, sehingga mampu melaksanakan tugasnya sesuai Petunjuk Teknis dengan benar. Pengelola dana BOS perlu ditingkatkan melalui pendidikan lanjut agar pengelola dana BOS betul-betul memahami petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang BOS serta mampu memahami uraian tugas pengelola BOS.
- c. Pemerintah Pusat (Direktorat Pembinaan SMA Jenderal Pendidikan Menengah Atas) diharapkan membuat

format pelaporan dan administrasi yang lebih sederhana sehingga memudahkan dalam pengelolaan dana BOS. Petunjuk Teknis harus selalu diperbaharui sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan karena masih terdapat aturan di petunjuk teknis yang tidak sesuai dengan perkembangan kebijakan dan pelaksanaan dana BOS, salah satunya adalah dalam Petunjuk Teknis BOS SMA 2018 disebutkan bahwa sekolah harus mengadakan seleksi pada calon penerima dana namun tetapi pelaksanaan semua siswa menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

DAFTAR PUSTAKA

- Erwantosi. (2010). Analisis Efektifitas, Akuntabilitas dan Transparansi Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Padang. *Tesis* Universitas Andalas.
- Fakultas Ekonomi (2018) Panduan Penyusunan Proposal dan Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Ngurah Rai Edisi 1.
- Fischer, Frank, Gerald J. Miller & Mara S. Sidney. (2015). *Analisis Kebijakan Publik Teori, Politik, dan Metode*. (alih bahasa: Imam Baihaqie). Bandung: Nusa Media
- Fitria . (2014). Efektivitas Pengelolaan Program Bantuan Operasional Sekolah Hani (BOS) (Studi Pada SMA PGRI Pandaan). *Skripsi* Universitas Negeri Surabaya.
- Hastyarini Ega Rezky. (2015). Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (BOS SMA) di SMA Negeri 1 Pejagon, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah tahun 2014. *Skripsi* Universitas Negeri Yogyakarta.
- Hasibuan Malayu SP. (2007). *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Hajimasagung.
- Manullang M. (2005). *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah

- Mada University Press.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Muchlis Hamdi. (2014). *Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi* Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mulyasa E. (2009). *Manajemen Berbasis Sekolah : Konsep, Strategi dan Implementasi*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mulyono. (2010). *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Nanang Fattah. (2013). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Remaja Posdakarya.
- Namawi, 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. PT. Raja Grafindo
- Persada Rosyada Dede . (2004). *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta : Kencana.
- Petunjuk Teknis 2015 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA
Petunjuk Teknis 2018 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA .
- Siagian, Sondang P. 2009. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta. PT. Asdi Mahasatya.
- Siswoyo , Dwi dkk. (2013). *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Suharsono AG . (2008). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudijono . Anas (2006). *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Supranto J. (2008). *Edisi Ketujuh Statistik Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sedarmayanti. 2011. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. CV. Mandiri Maju. Bandung.
- William N Dunn, . (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (alih bahasa: Samodra Wibawa, dkk). Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.